

## ANALISIS HARGA, IMPOR, DAN EKSPOR SUSU

Haris Budiyo

### Abstract

*In mid of 2007, world market prices for milk powder and other milk products have increased dramatically, reaching levels about double those observed only at six months earlier. Both supply and demand side factors played a role in this sharp elevation on world dairy prices. A direct effect was the increasing prices of various milk products in domestic market, since the milk products manufacturers in the country use about 75 % raw materials from those imported SMF and FCM. This article analyzed the situation of supply and demand side in domestic market, including the impact of world dairy prices on fresh milk those produced by local farmers.*

**Keyword :** *World market prices, fresh milk prices, skim milk powder and full cream milk powder.*

### 1. Pendahuluan

Hal yang aktual dan menarik untuk dicermati adalah lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK-011/2008 yang mulai berlaku sejak Tanggal 7 Oktober sampai dengan 31 Desember 2008, pemerintah mengeluarkan subsidi bagi “industri pengolahan susu” (IPS) sebesar Rp 107.000.000.000, agar mereka terbebas dari bea impor “bahan baku susu” sebesar 5 %. Bahan baku susu tersebut antara lain : “*Skim Milk Powder*” (SMF) dan “*Full Cream Milk*” (FCM). Bila disimak secara awam, maka sungguh ironis bila pemerintah menyalurkan subsidi kepada IPS yang berstatus sebagai produsen produk susu dan juga berperan sebagai “importir” SMF dan FCM. Namun, pemerintah menempuh kebijakan ini dilandasi pertimbangan perlunya menekan laju kenaikan harga produk susu di dalam negeri yang semakin tinggi pada Tahun 2007 dan 2008, seiring dengan kenaikan harga produk susu di pasar susu internasional akibat terganggunya produksi susu utama dunia, yakni di Australia dan Selandia Baru. Untuk menyimak situasi ini, penulis melakukan kajian berjudul “**Analisis Harga, Impor, dan Ekspor Susu**”. Analisis ini mengkaji persoalan produksi dan konsumsi susu di dalam negeri, pemasaran susu segar dalam negeri, fenomena kenaikan harga susu di pasar internasional, dan perkembangan impor dan ekspor susu.

## 2. Persoalan Produksi dan Konsumsi Susu di Dalam Negeri

Untuk menyimak produksi susu segar dalam negeri (SSDN) dan konsumsi susu di Indonesia disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi dan Konsumsi Susu di Indonesia, Tahun 2004-2007

Tahun	Produksi susu segar dalam negeri (SSDN) (ribu ton) *	Konsumsi susu (ribu ton)	% Susu segar dalam negeri (SSDN) terhadap konsumsi	Jml penduduk (juta)	Konsumsi (kg/kap/ th)
2004	463,6	2.068,2	22,4	218	9,5
2005	451,8	2.046,1	22,1	220	9,3
2006	519,7	2.324,3	22,4	222	10,47
2007	536,9	2.345,3	22,9	224	10,47

Sumber : Departemen Perindustrian (2008), \*) yang terserap melalui Industri Pengolahan Susu (IPS).

Tabel 1. menunjukkan bahwa bahwa produksi susu segar dalam negeri (SSDN) masih jauh dari jumlah yang dapat memenuhi konsumsi susu di pasar domestik sendiri, pada Tahun 2007 SSDN hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi susu domestik sebesar 22,9 %. Senjang produksi dan konsumsi ini merupakan peluang bagi pengembangan produksi SSDN. Selain itu peluang juga semakin terbuka, berdasarkan tingkat konsumsi susu per kapita per tahun di dalam negeri, tercatat pada Tahun 2007 baru mencapai 10,47 kg/kapita/tahun. Menurut Departemen Perindustrian (2008), konsumsi susu di Indonesia masih jauh di bawah negara-negara ASEAN, yakni Philipina 20 kg/kapita/tahun, Malaysia 20 kg/kapita/tahun, Thailand 20-25 kg/kapita/tahun, dan Singapura 32 kg/kapita/tahun. Dengan demikian sebenarnya peluang pengembangan produksi SSDN masih sangat terbuka. Namun demikian peluang tersebut dihadapkan pada sejumlah persoalan, yakni terkendalanya pengembangan usaha ternak sapi perah di Indonesia, rendahnya produktivitas ternak sapi perah, dan pola konsumsi masyarakat terhadap susu.

Berdasarkan statistik data populasi dan produksi susu sapi perah yang dikeluarkan oleh Dirjen Peternakan-Departemen Pertanian (2008) tampak bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan produksi susu sapi perah. Pada Tahun 2006 terdapat 369.000 ekor sapi perah yang menghasilkan 616.500 ton susu sapi segar, selanjutnya pada Tahun 2007 terjadi peningkatan produksi susu sapi segar menjadi 636.900 ton susu sapi segar yang dihasilkan dari 378.000 ekor sapi. Persoalan yang paling mendasar adalah bahwa sentra produksi susu di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa (97,80%), situasi ini jelas menyulitkan pengembangan usaha ternak sapi perah di Indonesia secara optimal. Menurut Sutardi (1981) usaha peternakan sapi perah di Indonesia terletak pada dua wilayah ekstrim yaitu: (1) wilayah yang memiliki kondisi fisik alam yang rendah akan tetapi memiliki kondisi sosial ekonomi (daya beli dan konsumsi) yang tinggi dan (2) wilayah dengan kondisi fisik alam yang tinggi tetapi mempunyai kondisi sosial ekonomi yang rendah. Pada dasarnya, tipe wilayah (1) merupakan dataran rendah yang terletak di sekitar kota besar dan bersuhu panas, dan tipe wilayah (2) menggambarkan pedesaan yang terletak di dataran tinggi dan bersuhu sejuk. Beberapa kelemahan yang timbul dari karakteristik tersebut adalah rendahnya penyediaan hijauan dan performa produksi pada tipe wilayah (1) serta minimnya penyediaan konsentrat dan rantai pemasaran susu di tipe wilayah (2).

Menurut Sudono (1999) peternakan sapi perah di Indonesia telah dimulai sejak abad ke-19 yaitu dengan pengimporan sapi-sapi bangsa *Ayrshire*, *Jersey*, dan *Milking shorthorn* dari Australia. Pada permulaan abad ke-20 dilanjutkan dengan mengimpor sapi-sapi Fries-Holland (FH) dari Belanda. Sapi perah yang dewasa ini dipelihara di Indonesia pada umumnya adalah sapi FH yang memiliki produksi susu tertinggi dibandingkan sapi jenis lainnya. Persoalan lainnya disampaikan oleh Erwidodo (1993) yang menyatakan bahwa kondisi peternakan sapi perah di Indonesia saat ini adalah skala usaha kecil (2-5 ekor), motif usahanya adalah rumah tangga, dilakukan sebagai usaha sampingan atau usaha utama, masih jauh dari teknologi serta didukung oleh manajemen usaha dan permodalan yang masih lemah. Erwidodo (1998) dan (Swastika et al., 2005) menyatakan bahwa peternakan sapi perah di Indonesia umumnya merupakan usaha keluarga di pedesaan dalam skala kecil, sedangkan usaha skala besar masih sangat terbatas dan umumnya merupakan usaha sapi perah yang baru tumbuh. Komposisi peternak sapi perah diperkirakan terdiri dari 80 persen peternak kecil dengan kepemilikan sapi perah < 4 ekor, 17 persen peternak dengan kepemilikan sapi perah

4-7 ekor, dan 3 persen kepemilikan sapi perah > 7 ekor. Persoalan berikutnya adalah rendahnya produktivitas sapi perah di Indonesia, menurut Balai Penelitian Ternak (2007) produksi susu rata-rata di Indonesia 8-10 liter/ekor/hari, karena umumnya kapasitas produksi lebih rendah dari 3.500 liter per 305 hari laktasi dan hanya 3% yang memproduksi lebih dari 5.000 liter per laktasi. Menurut Yusdja (2005) sebenarnya kapasitas produksi susu ternak sapi perah di Indonesia masih bisa ditingkatkan hingga 15-20 liter/ekor/hari.

### **3. Pemasaran Susu Segar Dalam Negeri**

Menurut Yusdja (2005), usaha ternak sapi perah telah berkembang sejak Tahun 1960-an ditandai dengan pembangunan usaha-usaha swasta dalam usaha sapi perah di sekitar Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Mulai Tahun 1977, pemerintah mulai menempuh kebijakan pengembangan usaha ternak sapi perah rakyat, dengan menempatkan koperasi sebagai penampung, pengolah, dan penyalur ke Industri Pengolahan Susu (IPS). Sebelum dijual ke IPS, susu yang ditampung oleh koperasi mendapatkan perlakuan tertentu sehingga memenuhi standar kualitas yang diminta oleh IPS. Susu segar yang ditampung oleh koperasi terutama dijual kepada IPS, baik IPS hulu maupun IPS hilir. IPS Hulu yaitu industri yang mengolah SSDN menjadi bahan baku susu (bubuk susu) yang akan diolah lebih lanjut oleh IPS hilir. Satu-satunya IPS Hulu yang ada di Indonesia adalah PT. Tirta Amerta Agung, namun saat ini sudah tidak beroperasi lagi karena bangkrut.

Susu segar yang dihasilkan para peternak hampir 90 persen dipasarkan melalui ke Industri Pengolahan Susu dan digunakan sebagai bahan baku industri mereka. IPS yang membeli susu segar sebagai bahan baku antara lain : PT Nestle di Jawa Timur (menyerap 550 ton/hari), PT Frieshe Vlag Indonesia, PT Indomilk, PT Ultra Jaya, PT Indolakto, PT Sari Husada, yang menyerap sekitar 500 ton per hari (Boediyana, 2006). Selain dijual ke IPS, ada juga susu dari peternak yang dijual kepada loper (pedagang pengumpul) susu dan ada juga yang langsung dijual ke industri rumah tangga. Industri rumah tangga tersebut mengolah susu segar dari peternak menjadi susu pasteurisasi, kemudian hasil susu pasteurisasi tersebut langsung dijual kepada konsumen lokal dengan kemasan yang sangat sederhana.

Masa keemasan koperasi susu dijumpai pada tahun 1980-an. Jumlah koperasi yang tadinya hanya 27 buah pada tahun 1979 berkembang tujuh kali lipat menjadi 198 pada tahun 1989. Demikian pula terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah tenaga kerja yang

terserap pada agribisnis persusuan, baik sebagai peternak pemilik maupun sebagai pekerja. Meningkatnya jumlah koperasi ini tidak terlepas dengan gencarnya program pemerintah dalam pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah pedesaan. Berdirinya GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia) pada tahun 1979 sangat berperan dalam mengkondisikan KUD - KUD untuk mengembangkan unit usaha persusuan, atau disebut KUD Susu. Dukungan penuh GKSI terlihat dalam mengembangkan sub-sistem agribisnis off farm yang dibutuhkan oleh subsistem on farm sapi perah yang dikembangkan oleh koperasi-koperasi primer.

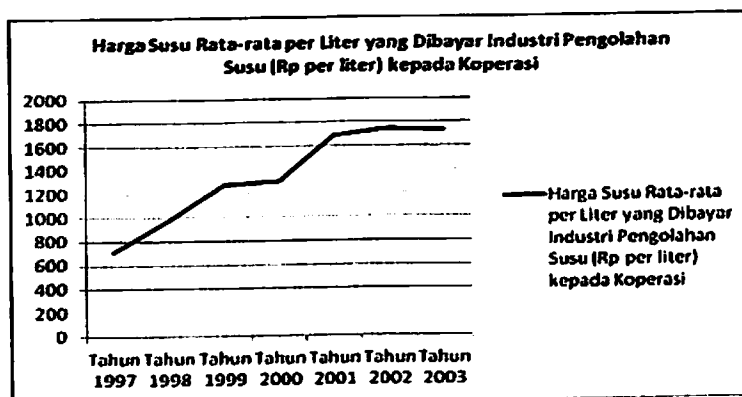
Selanjutnya, dalam rangka melindungi usaha ternak sapi perah rakyat, maka pemerintah mewajibkan IPS untuk menyerap susu segar dalam negeri. Kebijakan wajib serap susu dalam negeri oleh IPS ini pertama kali dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) menteri, yakni Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Tanggal 21 Juli 1982, lebih lanjut SKB Tiga Menteri ini dikuatkan oleh Inpres No. 2 Tahun 1985. Sebagai contoh pada Tahun 1982 ditetapkan "*ratio import quota*" 1 : 7, artinya pihak IPS diizinkan untuk mengimpor bahan baku susu sebanyak 7 ton, setelah menunaikan kewajibannya menyerap susu segar dalam negeri sebanyak 1 ton. Kebijaksanaan ini dikenal dengan kebijaksanaan busep (bukti serap). Selanjutnya melalui SK Menteri Perdagangan Nomor 683/Kp/VI/85 Tahun 1985, rasio ini ditetapkan menjadi 1 : 2.

Sementara itu, pelaksanaan impor susu juga diatur oleh Keputusan Bersama menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 656/Kpb/IV/85, Nomor 18/2/Kep/GBI, tentang penyempurnaan ketentuan-ketentuan umum di bidang impor, yang terdiri dari 19 pasal. Impor bahan baku susu untuk memenuhi kebutuhan Industri atau pabrik non-susu dapat dilakukan oleh importir yang terdaftar. Dalam hal tarif impor, pemerintah memberlakukan tarif 5 % untuk "*raw materials*" (SMP, AMF, FCMP, dan BMP) sedangkan untuk "*end products*" ("*butter*" dan "*cheese*") berlaku 30 %. Bahkan pemerintah pernah melarang impor susu siap konsumsi untuk pelbagai level konsumsi. Sementara itu, lisensi impor hanya diberikan kepada PT Panca Niaga, PT Kerta Niaga, dan IPS tertentu. Kemudian pada Tahun 1987, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menutup semua kemungkinan untuk investor asing untuk membuka industri pengolahan susu dan hanya beberapa macam yang masih terbuka bagi investor domestik. Selanjutnya Paket

**Kebijaksanaan Tanggal 23 Mei 1995 (Pakmei)**, menyatakan bahwa IPS tertutup bagi penanaman modal baru, atau dengan kata lain IPS dimasukkan ke dalam kelompok industri DNI (daftar negatif investasi), kecuali bila pihak investor sanggup membuka industri pengolahannya terpadu dengan peternakan sapi perahnya. Industri persusuan secara keseluruhan merupakan salah satu industri yang berada pada posisi yang sangat sulit dalam menghadapi era perdagangan bebas. Setidaknya ada 4 (empat) aturan yang dapat menjelaskan hal itu yaitu (1) *“import ratio requirement”*, yang merupakan hambatan non tarif dimana susu impor dikenai restriksi kuantitas yang diparalelkan dengan susu lokal, (2) beban tarif impor, (3) skema lisensi impor yang hanya diberikan kepada importir tertentu, dan (4) restriksi investasi. Selain itu beban regulasi ini masih ditambah lagi dengan ketentuan dari pemerintah daerah. Sebagaimana telah disinggung restriksi perdagangan justru membawa industri ke arah inefisiensi dan masyarakat secara keseluruhan dirugikan. Namun demikian, berlindung di balik argumen *“infant industry”* beberapa fasilitas diberikan kepada industri persusuan secara keseluruhan, mulai dari usaha ternak hingga pabrik. Pelbagai kebijaksanaan yang telah disebutkan memperlihatkan situasi yang sangat kompleks. Pada satu sisi, menyangkut kepentingan peternak yang rata-rata termasuk usaha ternak skala kecil, sementara pada sisi yang lain kepentingan melindungi IPS.

Namun, sejak ditandatanganinya kesepakatan antara Pemerintah RI dengan IMF pada Bulan Januari 1998 tentang penghapusan tataniaga SSDN, maka sejak saat itu sistem rasio BUSEP juga telah dihapus. Dengan ketentuan tersebut sesungguhnya SSDN saat itu seolah telah “diarahkan” memasuki pasar bebas lebih awal dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan, yakni pada Tahun 2003. Sejak saat itu pemasaran susu ke IPS tanpa perlindungan dan menempatkan peternak sapi perah ataupun koperasi pada posisi tawar yang lemah. Sejak saat itu peternak menerima pembayaran susu yang tidak seimbang dengan biaya produksi. Situasi ini yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kondisi stagnan produksi susu segar dalam negeri karena iklim pasarnya kurang kondusif bagi peternak.

Untuk menyimak perkembangan harga susu rata-rata per liter, berikut disajikan grafik perkembangan harga susu yang dibayarkan oleh IPS kepada koperasi.



Sumber : Stanton, Emms & Sia (2005)

Gambar 1. Perkembangan Harga SSDN, Tahun 1997-2003

Pada Gambar 1. terlihat grafik harga susu rata-rata per liter yang dibayar oleh IPS kepada koperasi pada Tahun 1997 (Rp 705/liter), Tahun 1998 (Rp 975/liter), Tahun 1999 (Rp 1.275/liter), Tahun 2000 (Rp 1.299/liter), Tahun 2001 (Rp 1.686/liter), Tahun 2002 (Rp 1.739/liter), dan Tahun 2003 (Rp 1.725/liter). Kenaikan harga beli SSDN oleh IPS yang paling tinggi terjadi pada Tahun 2001. Menurut Boediyana (2008), sebelum Bulan Mei 2007, peternak hanya menerima sekitar Rp 1.600– Rp 1.700 per liter, dengan kualitas standar 12 % Total Solid. Padahal harga produk susu di pasaran saat itu setara 1 liter susu segar mencapai angka di atas Rp 7.000 (antara Rp 7.000 - Rp. 15.000). Sebagai perbandingan dengan negara lain (Jepang), yang masih memberikan proteksi yang kuat terhadap usaha ternak sapi perah rakyat di negaranya, harga di tingkat peternak di Jepang pada Tahun 2003 adalah Rp 3.983 (US\$ 0.46) per liter.

#### 4. Fenomena Kenaikan Harga Susu di Pasar Susu Internasional Tahun 2007

Bulan Juni Tahun 2007 sampai dengan awal Tahun 2008 merupakan momentum penting yang mengisyaratkan betapa perlunya memelihara ketahanan produksi susu dalam negeri, karena selama kurun waktu itu terjadi fenomena kenaikan harga susu di pasar dunia. Fenomena itu terjadi karena beberapa sebab, yang berkaitan dengan faktor “supply” dan “demand” susu di pasar internasional. Pada awal Tahun 2006, harga “Skim Milk Powder” (SMP) di pasar internasional sebesar US \$ 2.100 per metrik ton, melonjak naik pada Bulan Agustus 2007 mencapai harga US \$ 5.450 per metrik ton. Sedangkan “Anhydrous Milk Fat” (AMF) mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi, pada awal Tahun 2007 harga

AMF sekitar US \$ 2.200 per metrik ton, 6 (enam) bulan kemudian harganya melonjak hingga mencapai US \$ 6.000 per metrik ton (Boediyana, 2008).

Menurut The Babcock Institute (2007) kenaikan harga susu di pasar internasional disebabkan oleh faktor "*supply*", yakni :

- a. Pada Tahun 2006, terjadi bencana kekeringan di Australia dan Selandia Baru, kedua negara tersebut dikenal sebagai "*the leading dairy exporters*", karena berkurangnya produksi susu, akhirnya mereka mengurangi jumlah ekspor, terutama AMF dan SMP.
- b. Pada Tahun 2006, beberapa negara di European Union (EU) mengalami penurunan produksi, karena gangguan cuaca yang mengakibatkan terganggunya ketersediaan pakan, juga ditambah dengan adanya penyesuaian *dairy policies* negara-negara EU.
- c. Pada tahun yang sama, Argentina dan India melakukan pengurangan kuota eksportnya.
- d. Terkurusnya cadangan "*skim milk powder*" yang dimiliki US secara berlebihan, yang biasanya mampu mengendalikan harga di pasar susu internasional.
- e. Adanya langkah konversi lahan untuk memproduksi biofuel di beberapa negara, terutama di US dan EU, sehingga mengakibatkan penurunan ketersediaan pakan, yang akhirnya berdampak pada kenaikan biaya produksi susu.

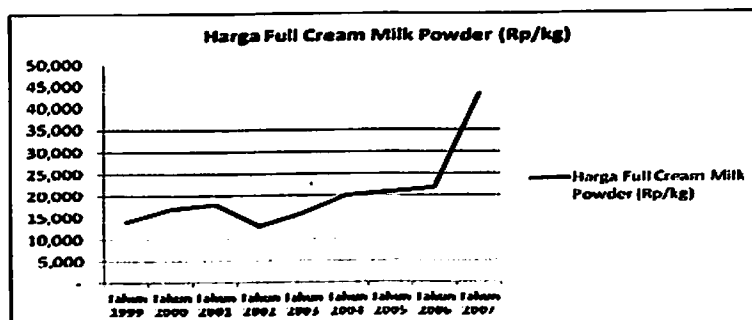
Sedangkan faktor "*demand*" yang mempengaruhi adalah :

- a. Konsumsi keju di dunia semakin meningkat, terutama di EU, terindikasi bahwa sejumlah pasokan yang semula untuk pembuatan SMF, dialihkan untuk pembuatan keju.
- b. Tumbuh dan berkembangnya daya beli di Asia, terutama di Cina, permintaan terhadap *dairy product* semakin meingkat, tercatat adanya kenaikan permintaan yang luar biasa di Asia, hingga mencapai 11 %.

Selama masa gejolak harga susu di pasar internasional itu berlangsung, IPS yang sudah terbiasa nyaman dengan pasokan bahan baku susu impor, mengalami dampak luar biasa akibat kenaikan harga kenaikan susu dunia. Dilaporkan bahwa Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengeluhkan adanya kenaikan bahan baku untuk membuat susu bubuk di dalam negeri dari Rp 26.000-27.000 per kilogram menjadi Rp 51.000 per kilogram (<http://us.detikfinance.com/read/2007/06/27>).



Untuk mengetahui perkembangan kenaikan harga bahan baku susu di Indonesia, akibat adanya kenaikan harga susu di pasar internasional pada Tahun 2007, disajikan grafik berikut ini.



Sumber : Understanding Dairy Market (2008), 1 US \$ = Rp 9.200.

Gambar 2. Perkembangan Harga FCM yang digunakan IPS sebagai Bahan Baku Susu, Tahun 1999-2007

Pada Gambar 2, tampak bahwa harga bahan baku susu yang digunakan IPS pada Tahun 2007 mengalami kenaikan harga 2 (dua) kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada dasarnya, harga bahan baku susu (impor) yang digunakan IPS sejak Tahun 1999 (Rp 14.758 per kg) sampai dengan Tahun 2006 (Rp 22.868 per kg) memang mengalami kenaikan, namun dengan pertumbuhan harga yang relatif kecil. Pada akhir Tahun 2007, harga bahan baku susu (impor) mencapai Rp 45.208 per kg. Kenaikan ini terus berlanjut hingga pertengahan Tahun 2008, namun pada akhir tahun ini (September 2008) mulai menurun hingga mencapai Rp 38.815 per kg.

Kenaikan harga bahan baku susu ini akhirnya menyebabkan kenaikan harga produk susu formula dan produk susu lainnya di Indonesia. Untuk mengurangi beban yang semakin tinggi yang dapat berdampak pada pengeluaran masyarakat, akhirnya pemerintah berinisiatif untuk menanggung beban dengan cara memberikan subsidi bagi “industri pengolahan susu” (IPS) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK-011/2008 yang mulai berlaku sejak Tanggal 7 Oktober sampai dengan 31 Desember 2008, dimana pemerintah mengeluarkan subsidi sebesar Rp 107.000.000.000, agar IPS terbebas dari bea impor “bahan baku susu” sebesar 5 %. Bahan baku susu dimaksud antara lain : “*Skim Milk Powder*” (SMF) dan “*Full Cream Milk*” (FCM).

Di sisi lain, ada hal yang menarik untuk dicermati, bahwa dengan adanya kenaikan harga susu di pasar internasional, memberikan hikmah kenaikan harga beli SSDN yang diserap oleh IPS. Berikut ini disajikan perbandingan harga bahan baku susu (impor) yang dibeli IPS (setara susu segar) dengan harga SSDN yang dibeli oleh IPS.



Sumber : Boediyana (2008)

Gambar 3. Perbandingan Bahan Baku Susu Impor dan Harga SSDN, Tahun 1999-2007

Pada gambar tampak bahwa kurva harga SSDN berada di bawah kurva harga bahan baku susu (impor) setara susu segar. Pada Tahun 2002, harga bahan baku susu (impor) setara susu segar mengalami penurunan hingga mencapai (Rp 1.725 per liter), selanjutnya mengalami kenaikan pada Tahun 2003 (Rp 2.139 per liter), Tahun 2004 (Rp 2.668 per liter), Tahun 2005 (Rp 2.792 per liter), Tahun 2006 (Rp 2.916 per liter), dan mencapai puncaknya pada Tahun 2007 (Rp 5.764 per liter). Pada Tahun 2007, harga beli SSDN oleh IPS juga mengalami kenaikan, menjadi Rp 2.431 per liter dibandingkan dengan harga beli pada Tahun 2006 (Rp 1.988 per liter). Menurut Boediyana (2008), kenaikan harga susu di pasar internasional ini terus berlanjut hingga awal Tahun 2008, sehingga harga SSDN yang diserap oleh IPS mencapai Rp 3.200 per liter.

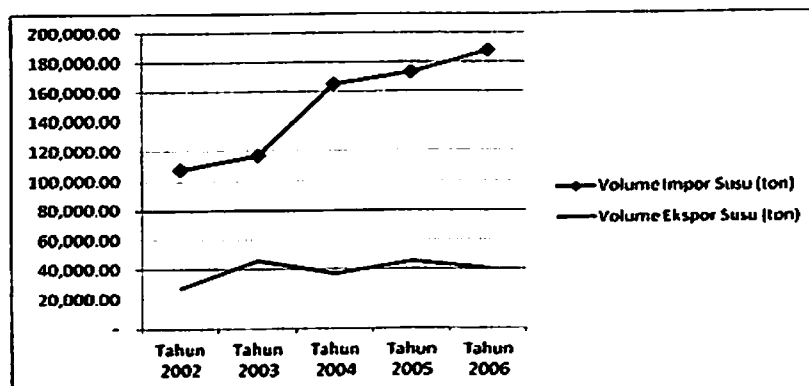
Secara ekonomis, kenaikan harga susu di pasar internasional telah menempatkan produk susu segar dalam negeri memiliki *bargaining power* dan lebih kompetitif. Melihat disparitas harga susu segar di dalam negeri dengan bahan baku susu impor, seharusnya SSDN memiliki peluang untuk memperoleh harga yang lebih baik. Idealnya harga SSDN sebesar 80 persen dari harga bahan baku susu impor yang diserap oleh IPS (Khairina, 2007). Disparitas harga SSDN yang relatif besar ini di tingkat IPS dan peternak ini, dikarenakan posisi tawar (*bargaining power*) peternak/koperasi terhadap IPS yang rendah. Harga susu lebih ditentukan oleh IPS berdasarkan standar baku mutu yang ketat seperti standar batas

kandungan mikroba (*Total Plate Count = TPC*) dan Total Solid yang harus dipenuhi SSDN yang dihasilkan oleh peternak dan disalurkan oleh koperasi ke IPS.

### 5. Perkembangan Impor dan Ekspor Produk Susu

Sebagaimana dimaklumi pada uraian di atas bahwa produksi SSDN belum dapat memenuhi kebutuhan IPS dalam memenuhi kebutuhan produk susu olahan yang diperlukan masyarakat, sehingga pemerintah memfasilitasi kebijakan bagi IPS untuk melakukan impor susu dalam bentuk susu bubuk untuk memenuhi permintaan susu dalam negeri. Susu bubuk tersebut diimpor dalam bentuk SMF (*Skim Milk Powder*) dan AMF (*Anhydrous Milk Fat*). Hasil produksi IPS berupa susu bubuk full cream, susu formula, susu kental manis, susu pasteurisasi, susu UHT, ice cream, keju, mentega, dan whey. Selain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, beberapa IPS juga sudah mampu melakukan penetrasi ekspor ke beberapa negara di Ais, Afrika, dan Timur Tengah.

Pada Gambar 3 berikut ini disajikan perkembangan volume impor dan ekspor susu, pada Tahun 2002-2006.



Sumber : Dirjen Peternakan-Departemen Pertanian (2008)

Gambar 3. Perkembangan Impor dan Ekspor Susu, Tahun 2002-2006

Pada grafik tampak bahwa volume impor susu secara terus menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 14,80 %. Sedangkan volume ekspor susu cenderung fluktuatif, dalam jumlah kurang lebih seperlimanya dari volume impor susu, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 9,41 %. Kenaikan volume susu impor yang paling tinggi (40,99 %) terjadi antara Tahun 2003 (117.318,15 ton) dan Tahun 2004 (165.411,49 ton). Dengan memperhatikan volume impor susu yang begitu besar ini

(pada Tahun 2006 sebesar 187.685,32 ton atau senilai 410.432,61 ribu US \$), maka diperlukan upaya dan langkah yang efektif agar ketergantungan terhadap susu impor dapat dikurangi atau bahkan dapat digantikan oleh SSDN.

## 6. Kesimpulan :

- a. Kenaikan harga bahan baku susu di pasar internasional merupakan momentum penting yang mengisyaratkan betapa perlunya memelihara ketahanan produksi susu dalam negeri, karena selama kurun waktu itu susu segar dalam negeri dapat menjadi “*buffer*” yang dapat menyanggah kebutuhan bahan baku susu bagi IPS, dengan terjadinya penurunan “*supply*” susu di pasar internasional;
- b. Pengembangan produksi SSDN dengan menitikberatkan pada peran dan kinerja koperasi juga harus diimbangi dengan pengembangan kapasitas produksi di tingkat peternak, selaku produsen, menyangkut produktivitas, efisiensi, dan kualitas susu yang dihasilkan. Selain itu pula, pemerintah perlu memperhatikan dan mendorong pengembangan usaha ternak sapi perah skala menengah (*medium scale holders*), yang diharapkan lebih memiliki peluang dan kapasitas untuk mengembangkan diri dan bahkan mampu bersaing terhadap pasokan produk susu impor.

## Daftar Pustaka :

1. **Balai Penelitian Ternak.** 2007. *Peluang dan Tantangan Revolusi Putih.* Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Volume 29 No. 5, Tahun 2007. Balai Penelitian Ternak, Ciawi, Bogor.
2. **Boediyana, T.** 2006. *Pengembangan Model Usaha Agribisnis Sapi Perah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah.* Makalah yang dipaparkan pada Workshop yang diselenggarakan oleh Ditjen P2HP, Bandung.
3. **Boediyana, T.** 2008. Menyongsong Agribisnis Persusuan yang Prospektif di Tanah Air. Majalah Trobos Nomor 108, September 2008, Tahun VIII, Jakarta.
4. **Departemen Perindustrian.** 2008. *Perkembangan Industri Pengolahan Susu di Indonesia.* Departemen Perindustrian, Jakarta.
5. **detikFinance.** 2007. *Harga Susu Melejit 100%.* (<http://us.detikfinance.com/read/2007/06/27>)
6. **Direktorat Jenderal Peternakan.** 2008. *Statistik Peternakan 2007.* Departemen Pertanian RI, Jakarta.

7. Erwidodo. 1998. *Dampak Krisis Moneter dan Reformasi Ekonomi terhadap Industri Persusuan di Indonesia*. Prosiding. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta.
8. Khairina. 2007. *Susu Sapi Juga Butuh Perhatian*. <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0707/21/Fokus/301562.htm>. 21 Juli 2007.
9. Stanton, Emms & Sia. 2005. *Industri Peternakan Sapi Perah Indonesia Analisa SWOT – 2005*. Proyek Riset yang Didanai oleh: Dairy Australia, Melbourne, Australia.
10. Sudono, A. 1999. *Dairy Science*, Department of Dairy Science, Faculty of Animal Science. Bogor Agricultural University Press (IPB), Bogor.
11. Sutardi, T. 1981. *Sapi Perah dan Pemberian Makanan*. Departemen Ilmu Makanan Ternak. Fakultas Peternakan IPB, Bogor.
12. Swastika, D. K. S, et. al. 2005. *Dampak Krisis Ekonomi terhadap Prospek Pengembangan Peternakan Sapi Perah*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, Bogor.
13. The Babcock Institute. 2007. *World Prices for Dairy Products Reach Unprecedented Highs from Short Supply and Strong Demand*. Internastional Dairy Notes, November 2007, Winsconsin University, USA.
14. Understanding Dairy Markets. 2008. *All Milk Prices*. <http://future.aae.wisc.edu/>
15. Yusdja, Y. 2005. *Kebijakan Ekonomi Industri Agribisnis Sapi Perah di Indonesia*. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 3 No. 3, September 2005. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.